LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

PERIODE TRIWULAN III

(BULAN JULI s/d SEPTEMBER TAHUN 2025)

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK
BANTEN
2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Diagram, Gambar dan Tabel ii

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Landasan Hukum 2

1.4. Rencana Kerja 3

BAB II

METODOLOGI 5

2.1. Metode Penelitian 5

2.2. Populasi dan Sampel 5

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis 5

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control* 5

2.5. Teknik Analisis Data 6

2.6. Tahapan Pelaksanaan 6

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI 9

3.1. Profil Responden 9

3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator 8

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan 16

3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan ..167

3.5. Nilai Unsur Tertinggi dan Nilai Terendah 18

BAB IV

PENUTUP 210

4.1. Kesimpulan 210

4.2. Rekomendasi 210

4.3. Lampiran 212

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

Daftar Diagram Batang

Diagram Batang 1

Tingkat Pendidikan Responden 8

Diagram Batang 2

Jenis Pekerjaan Responden 8

Diagram Batang 3

Domisili Responden 9

Diagram Batang 4

Usia Responden 9

Diagram Batang 5

Layanan yang Digunakan 10

Diagram Batang 6

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan 10

Diagram Batang 7

Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan 11

Diagram Batang 8

Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh 11

Diagram Batang 9

Indeks pada Indikator Transparansi Biaya 12

Diagram Batang 10

Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia 12

Diagram Batang 11

Indeks pada Indikator Tambahan Biaya 13

Diagram Batang 12

Indeks pada Indikator Hadiah 13

Diagram Batang 13

Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran 14

Diagram Batang 14

Indeks pada Indikator Percaloan 14

Diagram Batang 15

Indeks pada Indikator Perbuatan Curang 15

Diagram Batang 16

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja 16

Daftar Gambar

Gambar 1

Model Alur Penyusunan Survei IPAK menuju Zona Integritas 6

Daftar Tabel

Tabel 1

Rencana Kerja Pelaksanaan 3

Tabel 2

Ruang Lingkup Survei Indeks Presepsi Anti Korupsi 6

Tabel 3

Nilai Persepsi 7

Tabel 4

Indeks Persepsi Anti Koruspi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung 16

Tabel 5

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung 16

Tabel 6

Isian Kesan dan Pesan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. 17

Tabel 7

Tiga Nilai Unsur Tertinggi Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 17

Tabel 8

Tiga Nilai Unsur Terendah Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 18

Tabel 9

3 Nilai Unsur Terendah 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan salah satu satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat berkaitan dengan pelayanan di lingkungannya.

Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dari nilai potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Dalam perkembangan saat ini survey dapat dilakukan secara elektronik berbasis aplikasi yang dinamakan Aplikasi SISUPER. Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang digunakan untuk melakukan

Survey Kepuasan Masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian. Survey Persepsi Anti Korupsi adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang persepsi korupsi terhadap layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Unsur Survey Persepsi Anti Korupsi adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran persepsi anti korupsi oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tujuan dari penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; dan
g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
j) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
k) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
l) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
m) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
n) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
o) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SiSuper) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

1.4. Rencana Kerja Pelaksanaan

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana

  Dilaksanakan Sendiri, yaitu survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan
  a. Kuesioner;
  b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar; dan
  c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  a. Jumlah Responden; dan
  b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

  Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner;
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan;
- Pengujian kualitas dan validitas data; dan
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

Pengukuran Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Rangkasbitung ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2025.

Tabel 1

Rencana Kerja Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Persiapan	1 Juli 2025
2.	Pelayanan Data Survei IPK	1 Juli 2025 s/d 30 September 2025
3.	Rekap Data Survei IPK	30 September 2025
4.	Pengolahan Data	30 September 2025
5.	Penyusunan dan Pelaporan	1 s/d 3 September 2025

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Metode Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok dijadikan sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa melakukan wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu

tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang sudah dibekali dengan pelatihan.

Hasil kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, saat membagikan kuesioner, saat mengumpulkan kuesioner, saat meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik Statistik Deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk *scoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

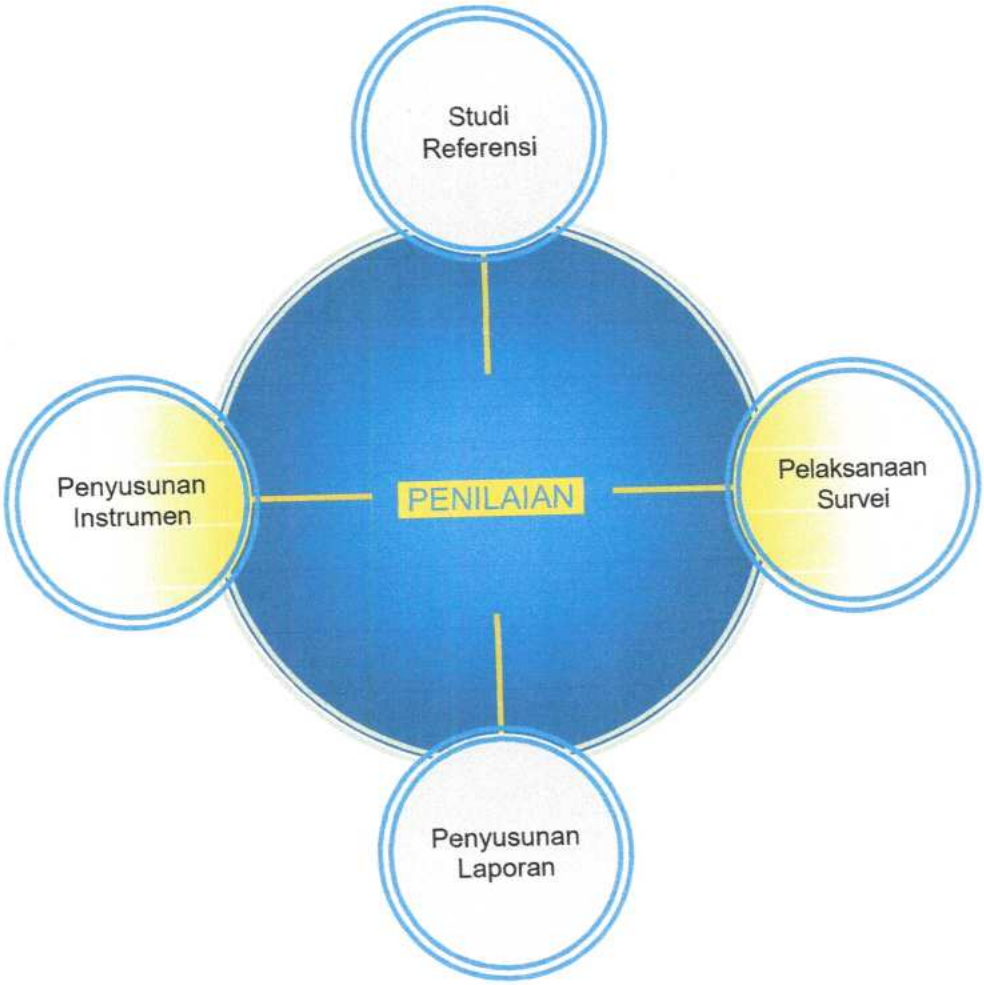
Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **Bersih dari Korupsi**.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai dengan realitas di lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1

Model Alur Penyusunan Survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang Lingkup Survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

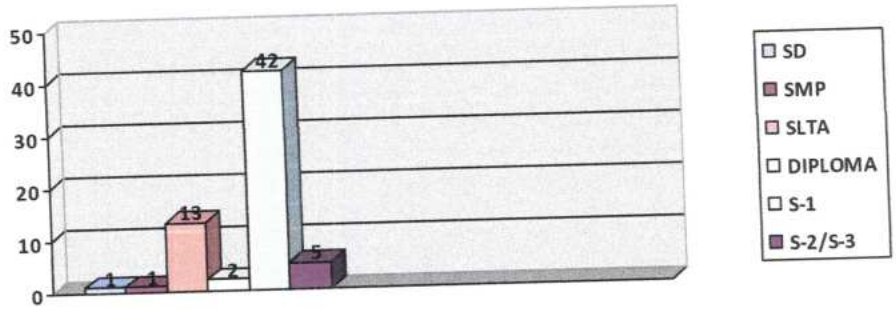
BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, menunjukkan bahwa 80,85% pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang Pendidikan Strata 1 (S-1).

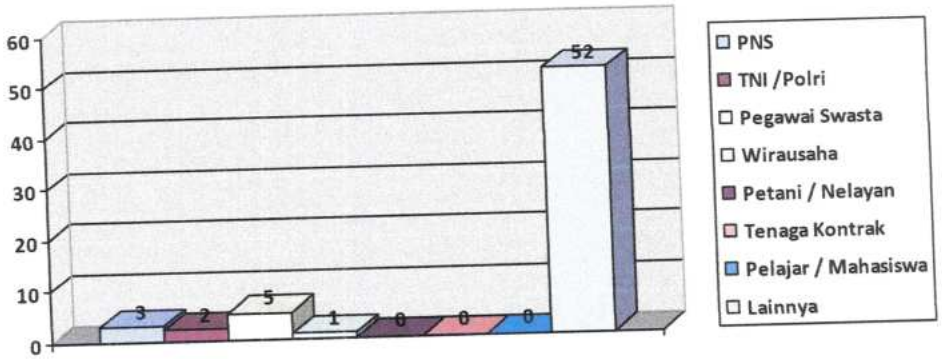
Diagram 1
Tingkat Pendidikan Responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 53,19% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki pekerjaan dalam kategori sebagai Pekerjaan Lainnya.

Diagram 2
Jenis Pekerjaan Responden

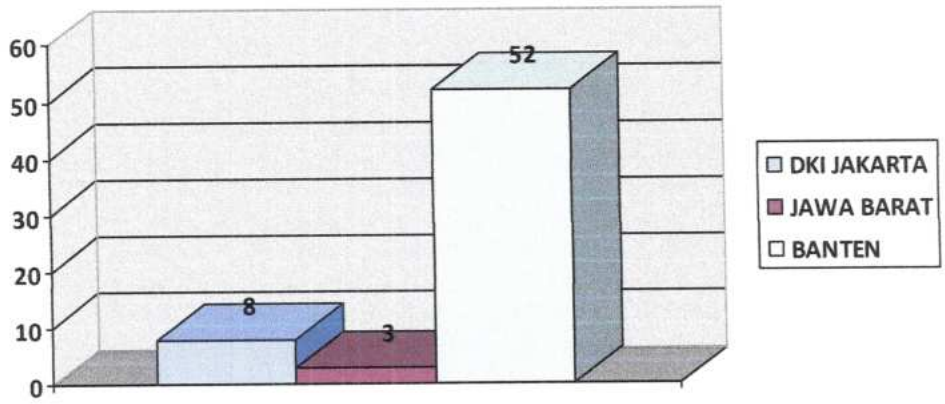


3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data berdasarkan

domilisi yang diisi oleh responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berdomisili di wilayah Provinsi Banten, yaitu 72,34%.

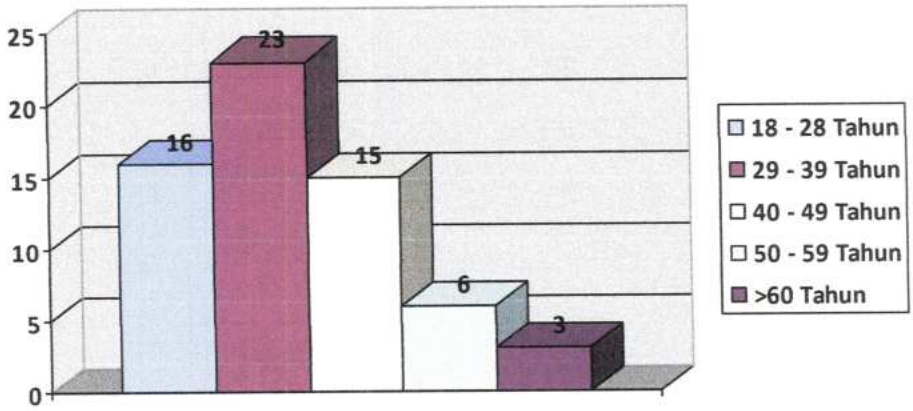
Diagram 3
Domisili Responden



3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun, lalu menyusul di kelompok usia 18 s/d 28 tahun dan kelompok usia 40 s/d 49 tahun. Bagi kelompok usia di atas 49 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di atas 60 tahun.

Diagram 4
Usia Responden

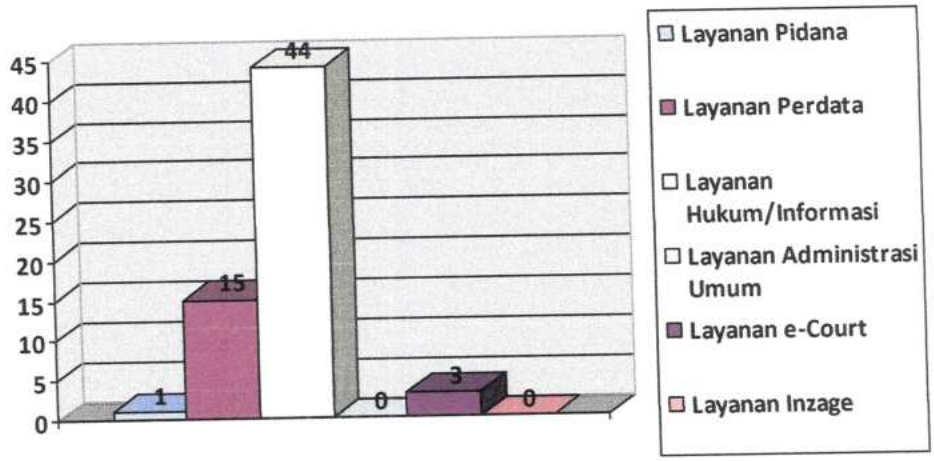


3.1.1. Layanan yang digunakan

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data Layanan yang digunakan oleh responden. Data tersebut menunjukkan bahwa layanan yang digunakan oleh pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, mayoritas adalah pada bagian Kepaniteraan Perdata, kemudian layanan Kepaniteraan Hukum, layanan Kepaniteraan Pidana, layanan Administrasi Umum, dan layanan Meja e-*Court* dan *Inzage*.

Diagram 5

Layanan yang Digunakan



3.2. Indeks Persepsi Anti korupsi per Indikator

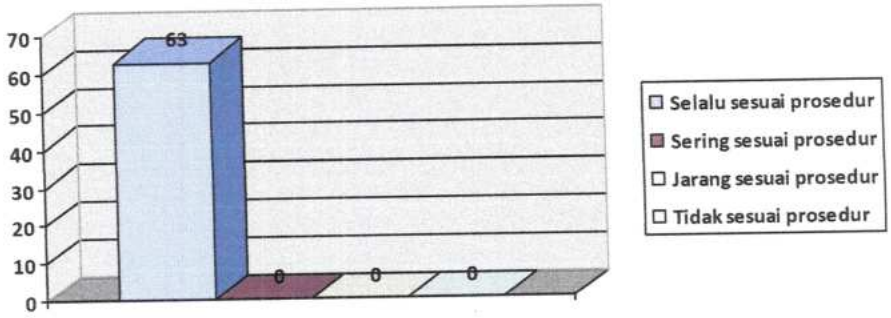
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4,000.**

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Manipulasi Peraturan.**

Diagram 6

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan



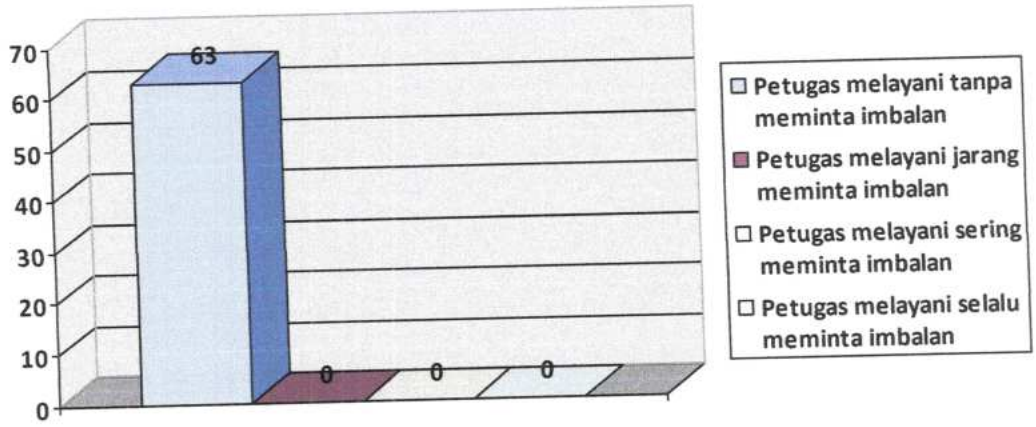
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai dengan 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4,000**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Penyalahgunaan Jabatan.**

Diagram 7

Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan



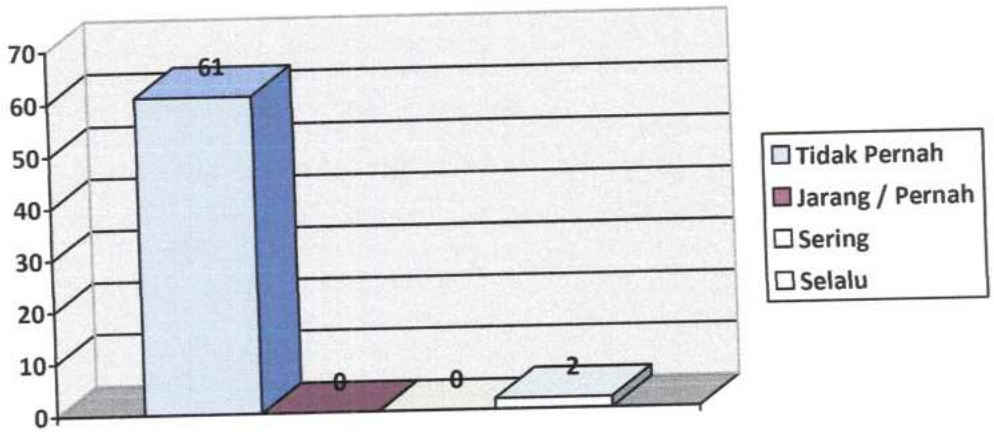
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4,000**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Menjual Pengaruh.**

Diagram 8

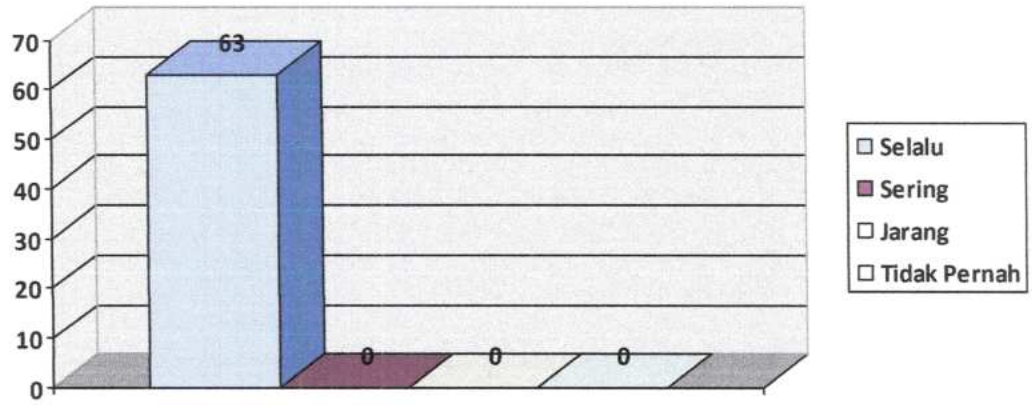
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai dengan 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4,000**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah menerapkan **Transparansi Biaya.**

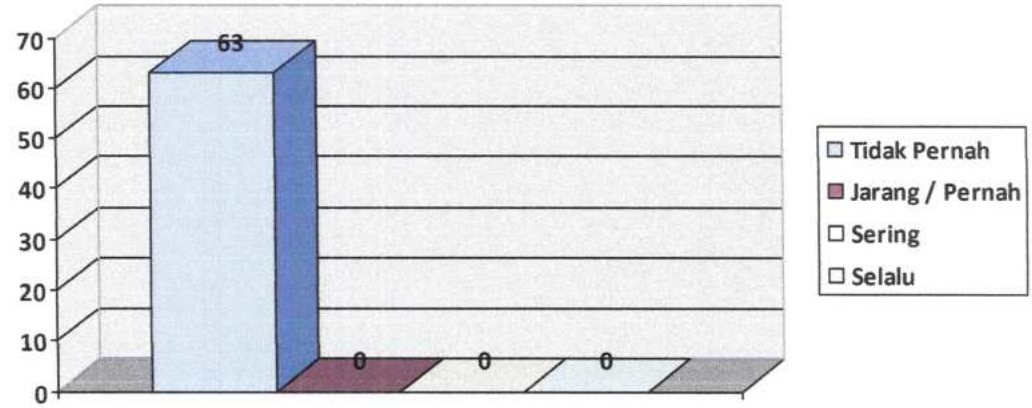
Diagram 9
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya



3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **4,000**.
Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Transaksi Rahasia.**

Diagram 10
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

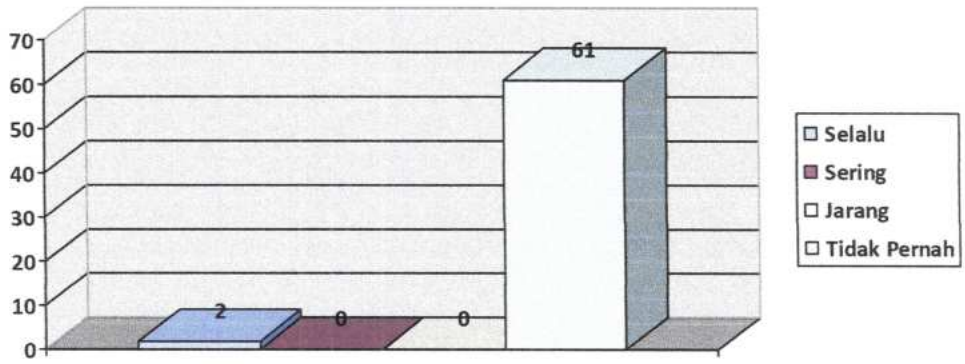


3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **4,000**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Biaya Tambahan.**

Diagram 11
Indeks pada Indikator Tambahan Biaya

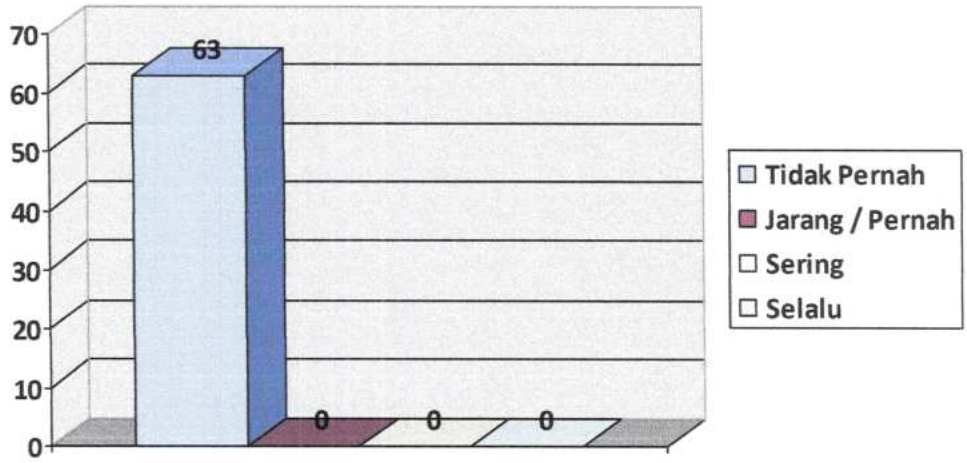


3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4,000**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Hadiah.**

Diagram 12
Indeks pada Indikator Hadiah



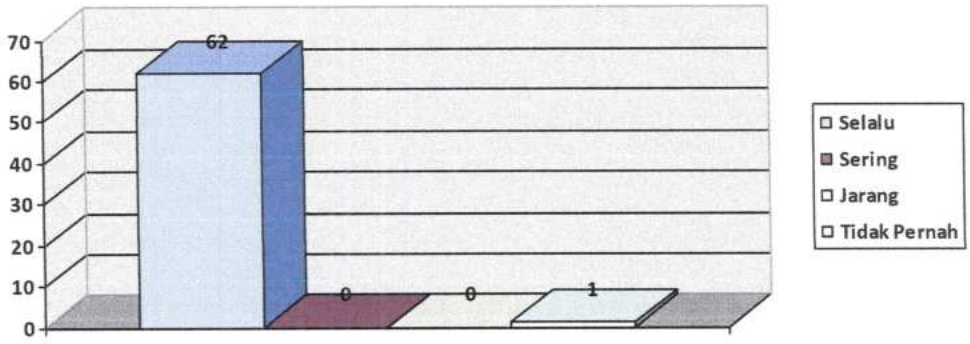
3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai dengan 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **4,000**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah menerapkan **Transparansi Pembayaran.**

Diagram 13

Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran



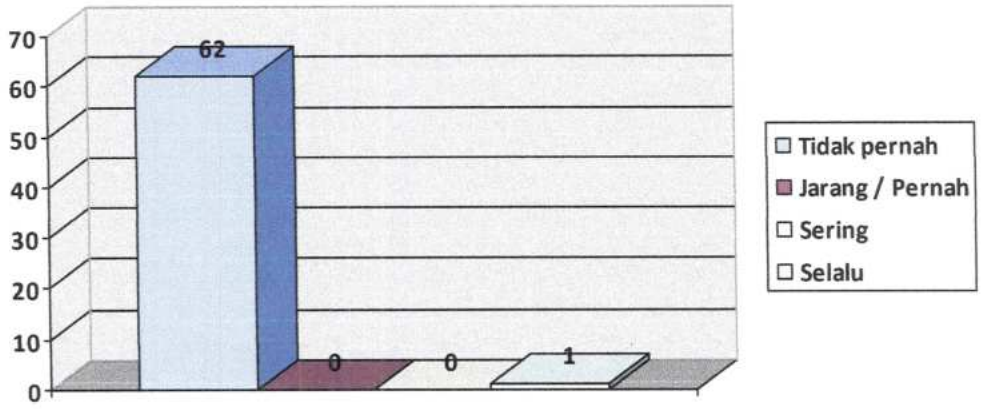
3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **4,000**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Percaloan.**

Diagram 14

Indeks pada Indikator Percaloan



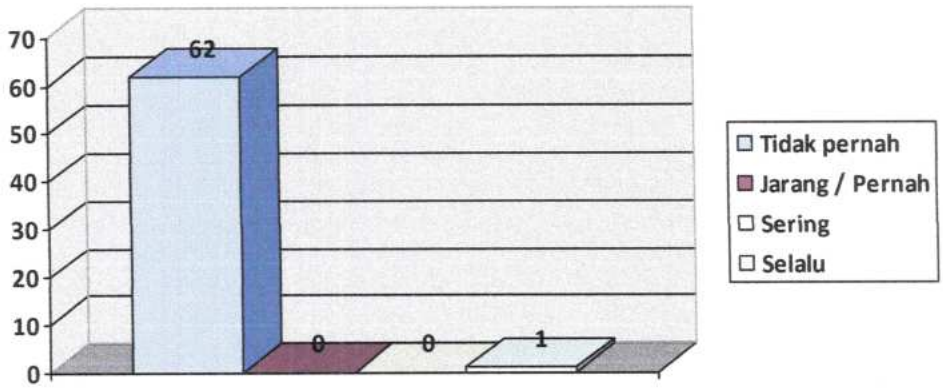
3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4,000**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Perbuatan Curang.**

Diagram 15

Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

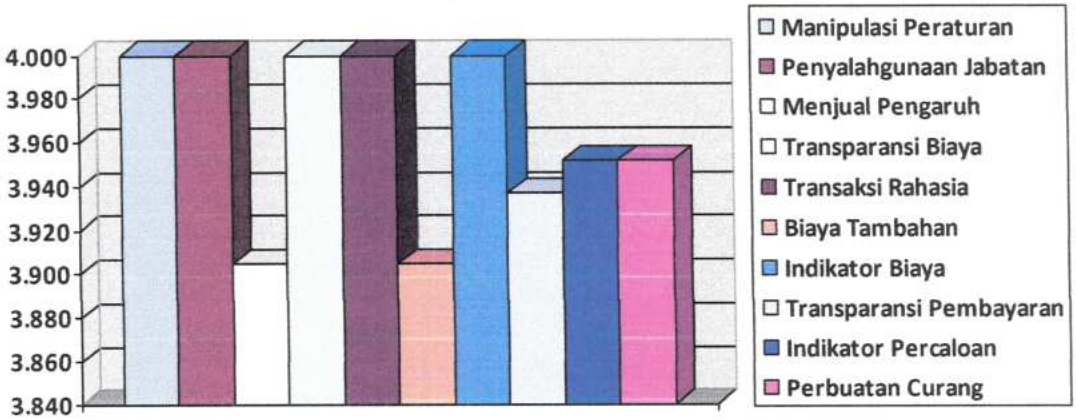


3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebesar **3,97/99.13%** dengan Kategori **Sangat Baik**.

Diagram 16

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung



Tabel 4

Indeks Persepsi Anti Koruspi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

No	Ruang lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	**4,000**	Sangat Baik	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	**4,000**	Sangat Baik	2
3	Menjual Pengaruh	**3,905**	Sangat Baik	10
4	Transparansi Biaya	**4,000**	Sangat Baik	3
5	Transaksi Rahasia	**4,000**	Sangat Baik	4
6	Biaya Tambahan	**3,905**	Sangat Baik	9
7	Hadiah	**4,000**	Sangat Baik	5
8	Percaloan	**3,937**	Sangat Baik	8
9	Transparansi pembayaran	**3,952**	Sangat Baik	7
10	Perbuatan Curang	**3,952**	Sangat Baik	6

Indeks **3,97** (dalam skala 4) tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di atas, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai Interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada angka 4 dengan nilai 3.26 – 4.00 dengan Nilai Interval Konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) berada pada angka 81.26 - 100,00 % dengan kinerja Bersih Korupsi.

Tabel 5

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan *output* skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun untuk masukan dan pandangan dari responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai berikut:

Tabel 6

Isian Kesan dan Pesan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

No	***Kesan dan Pesan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan***
1	Baik
2	sangat baik dan sigap
3	pelayanan baik
4	Pelayanan sangat baik dan cepat
5	selalu sesuai prosedur
6	Pelayanan sudah baik
7	Pelayanan sudah bagus
8	Layanan yang diberkan sudah baik dan sesuai prosedur
9	Petugas Layanan melayani dengan ramah dan baik
10	Pelayanan yang diberikan sudah baik, begitu pun dengan Petugas Layanan melayani dengan sopan dan ramah
11	Petugas layanan sangat ramah dan layanan yang diberikan sudah sangat baik
12	Layanan sesuai dengan prosedur, petugas layanan sangat ramah dan jelas dalam memberikan layanan
13	Petugas layanan memberikan layanan dan informasi dengan baik dan jelas dengan penyampaian yang sopan

No	*Kesan dan Pesan Pengguna Layanan Satuan Kerja* **pada Pengadilan**
14	Petugas sangat sopan, ramah dan baik dalam memerikan layanan
15	Petugas layanan sangat kompeten dan dapat membantu
16	Layanan yang diberikan sudah sangat baik dan sesuai prosedur
17	Petugas layanan sangat ramah dalam melakukan pelayanan
18	Pelayanan sudah sangat baik
19	Petugas layanan sangat ramah dan kopeten, pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur
20	Layanan yang diberikan sudajh baik.

3.5. Tiga Nilai Unsur Tertinggi dan Terendah

Dari hasil survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang telah dilakukan pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung didapati Tiga Nilai Unsur Tertinggi dan Terendah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 7

Tiga Nilai Unsur Tertinggi
Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	252
2	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	252
3	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	252

Tabel 8

Tiga Nilai Unsur Terendah
Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

No.	Unsur	Nilai
1	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	246
2	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	246
3	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	248

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPAK) **3,97% / 99.13** (dalam Skala 4) atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi / Sangat Baik.**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000 dengan kategori sangat baik
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000 dengan kategori sangat baik
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,905 dengan kategori sangat baik
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000 dengan kategori sangat baik
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000 dengan kategori sangat baik
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,905 dengan kategori sangat baik
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000 dengan kategori sangat baik
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,937 dengan kategori sangat baik
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,952 dengan kategori sangat baik
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,952 dengan kategori sangat baik

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Triwulan III Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa rata-rata indikator memiliki indeks **3,97** atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi**.

Meskipun demikian, untuk dapat terus mempertahankan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat dan petugas yang selalu berintegritas dalam bekerja tanpa menerima dan mengharapkan imbalan di luar biaya yang telah ditentukan, maka perbaikan dan peningkatan kinerja serta integritas akan terus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Rangkasbitung, 1 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

LAMPIRAN

REKAP SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

20 (DUA PULUH) RESPONDEN

1. PENDIDIKAN TERAKHIR

Tidak Sekolah	:	0
SD	:	1
SMP/SLTP	:	1
SLTA	:	13
Diploma (D1/D2/D3/D4)	:	1
Sarjana (S1)	:	42
Pasca Sarjana (S2/S3)	:	5
Total		**63**

2. JENIS KELAMIN

Laki-laki	:	52
Perempuan	:	11
Total		**63**

3. PEKERJAAN UTAMA

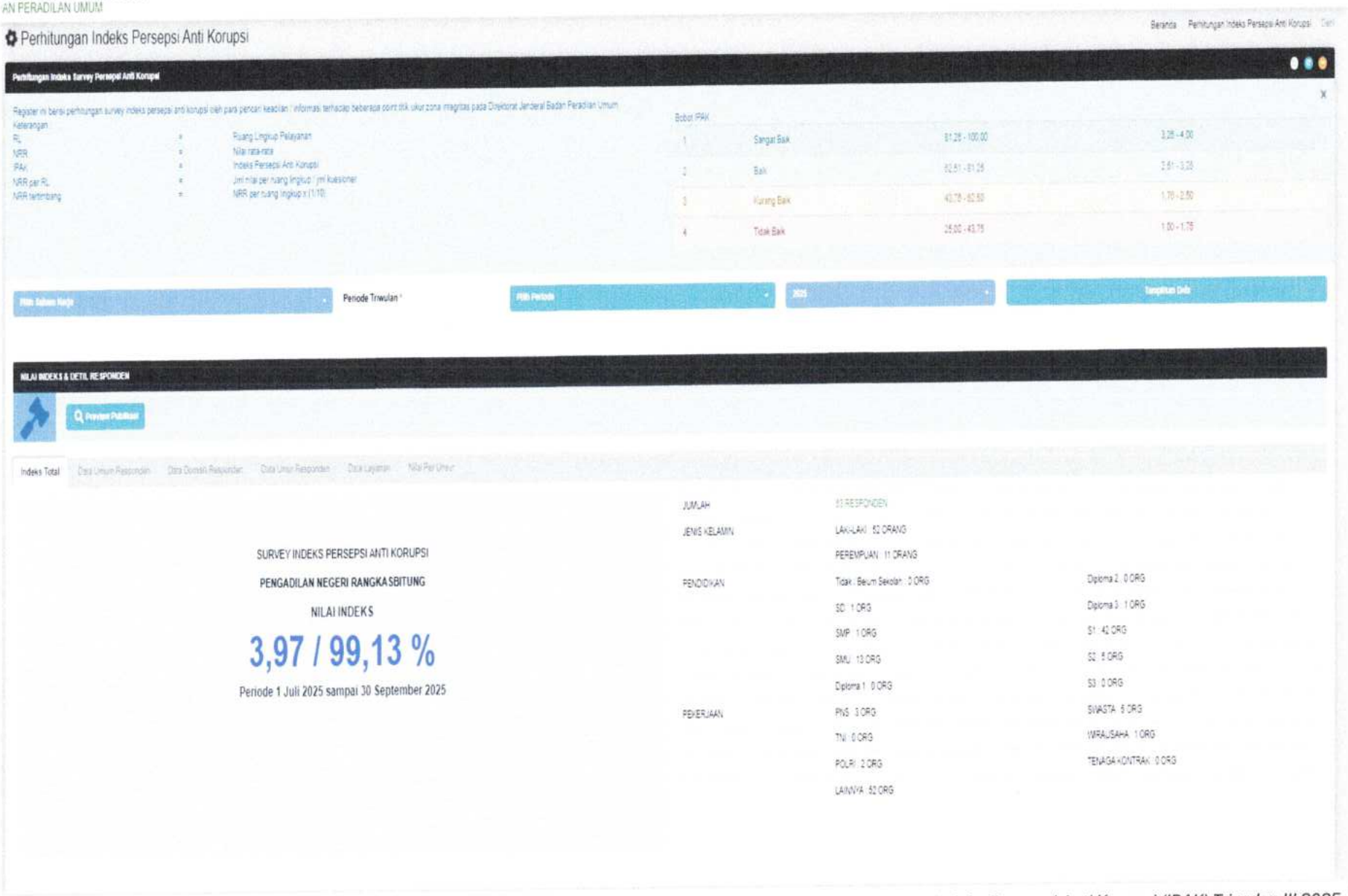
PNS/TNI/POLRI	:	5
Pegawai Swasta	:	5
Wirausaha	:	1
Pelajar/Mahasiswa	:	0
Tenaga Kontrak	:	0
Lainnya	:	52
Total		**63**

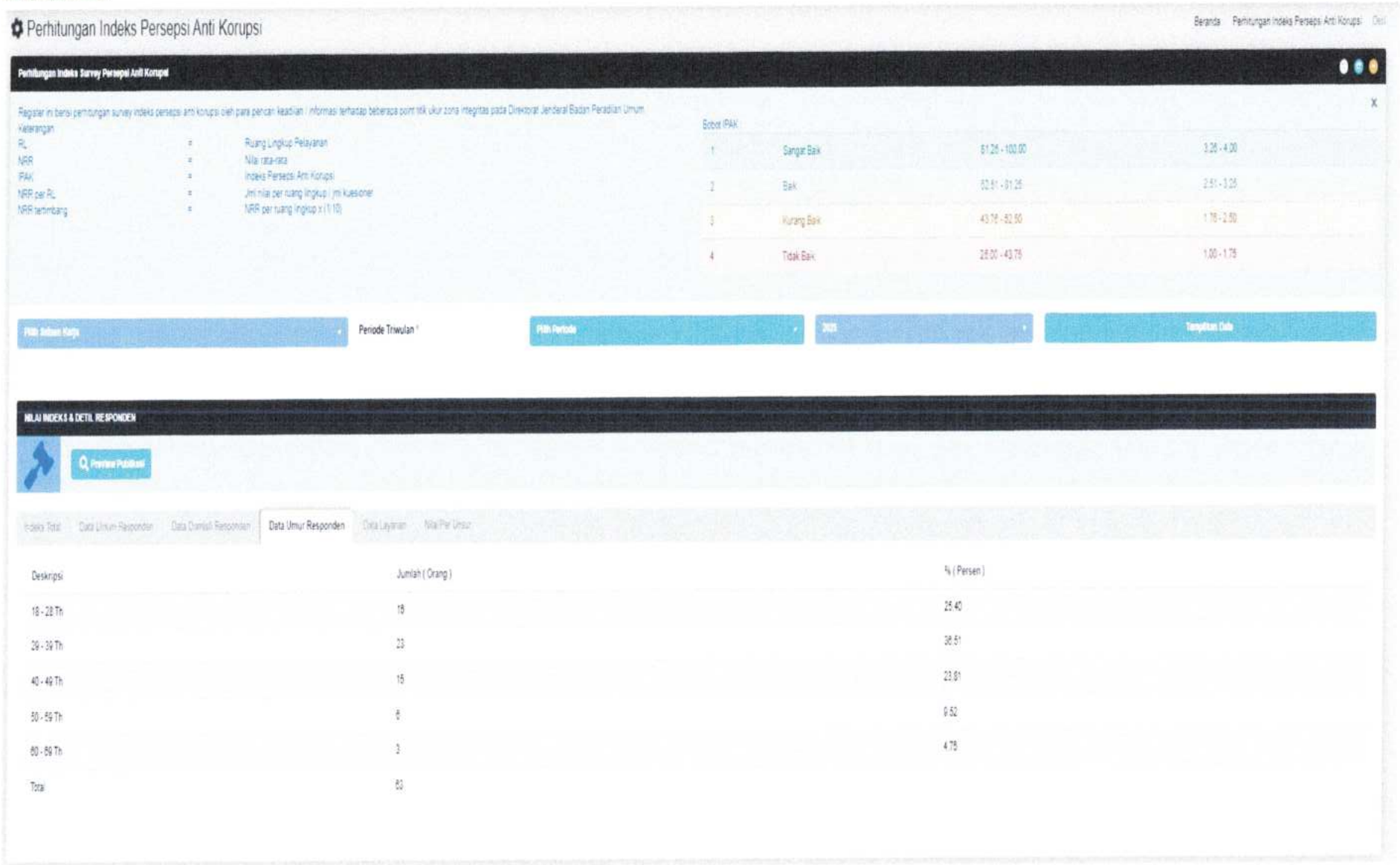
4. UMUR

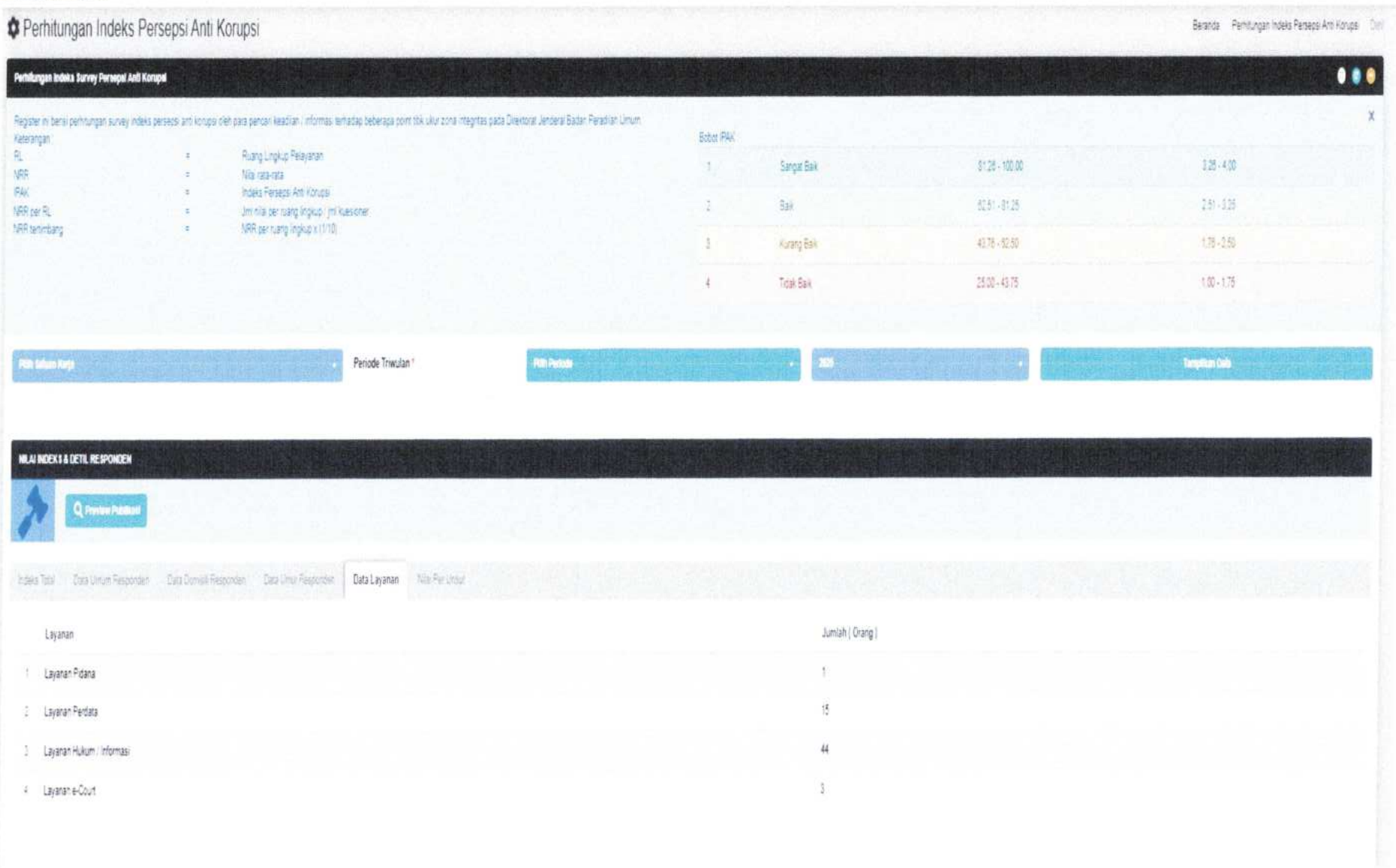
18 – 28 Tahun	:	16
29 – 39 Tahun	:	23
40 – 49 Tahun	:	15
50 – 59 Tahun	:	6
>60 Tahun	:	3
Total		**63**

LAYANAN ELEKTRONIK
AN PERADILAN UMUM

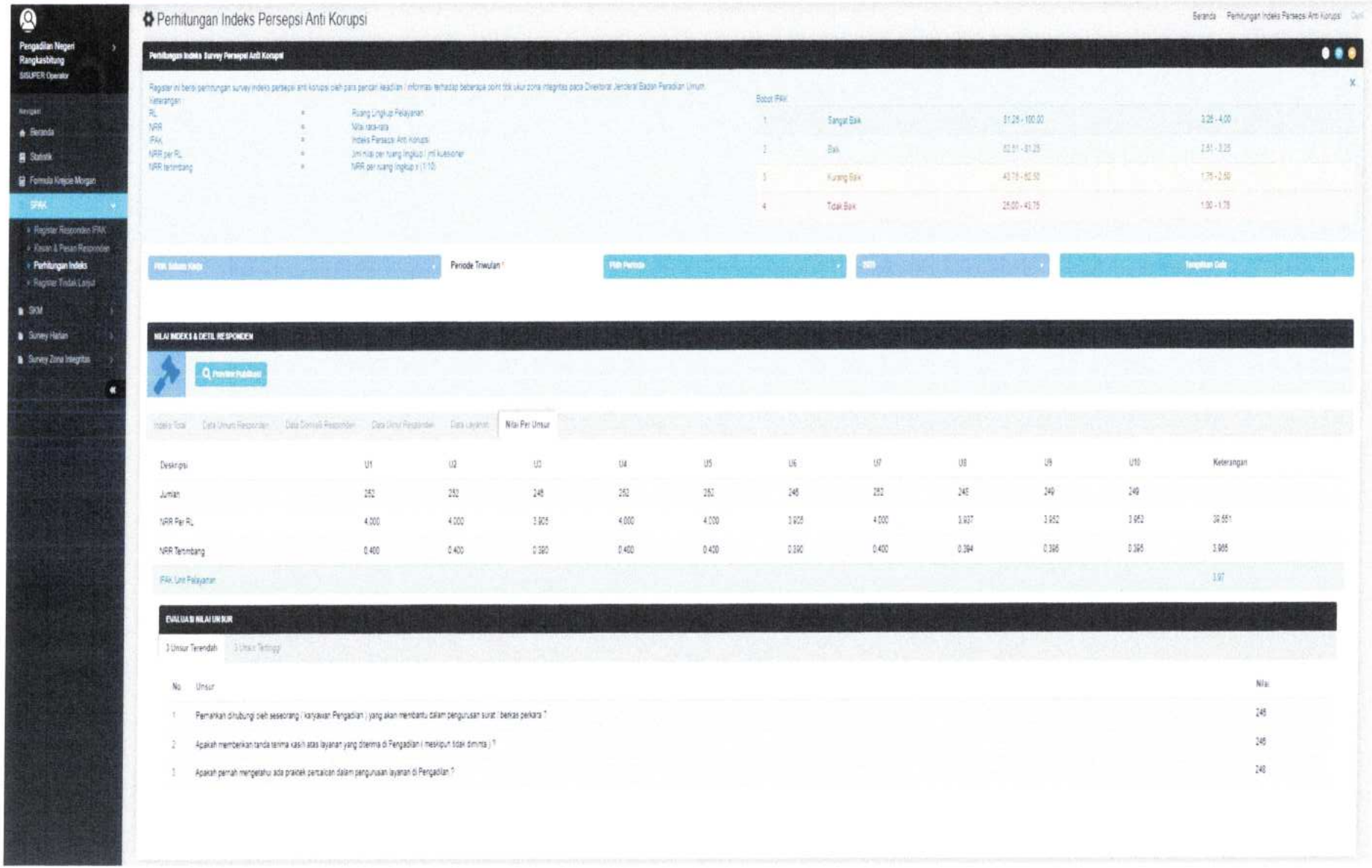
Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

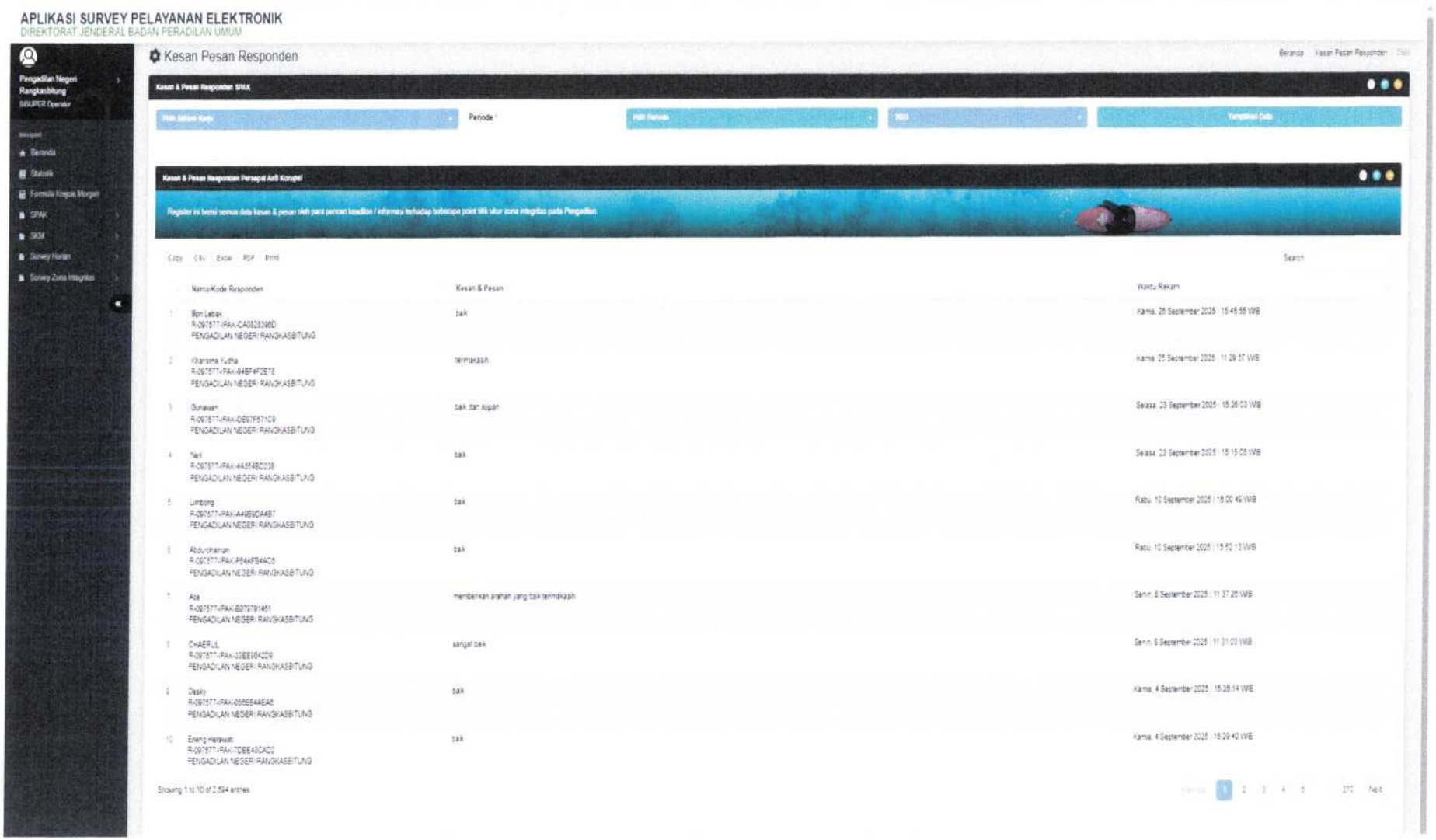



Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi
Beranda Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi
Perhitungan Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi
Register ini berisi perhitungan survey indeks persepsi anti korupsi oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik ukur zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Keterangan
RL = Ruang Lingkup Pelayanan
NRR = Nilai rata-rata
IPAK = Indeks Persepsi Anti Korupsi
NRR per RL = Jml nilai per ruang lingkup / jml kuesioner
NRR terimbang = NRR per ruang lingkup x (1/9)
Bobot IPAK
1 Sangat Baik 81.26 - 100.00 3.26 - 4.00
2 Baik 62.51 - 81.25 2.51 - 3.25
3 Kurang Baik 43.76 - 62.50 1.76 - 2.50
4 Tidak Baik 25.00 - 43.75 1.00 - 1.75
Periode Triwulan *
2025
NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN
Preview Publikasi
Index Total
Data Umum Responden
Data Domisili Responden
Data Umur Responden
Data Layanan
Nilai Per Unsur
Deskripsi
Jumlah (Orang)
% (Persen)
18 - 28 Th 18 25.40
29 - 39 Th 23 36.51
40 - 49 Th 15 23.81
50 - 59 Th 6 9.52
60 - 69 Th 3 4.76
Total 63

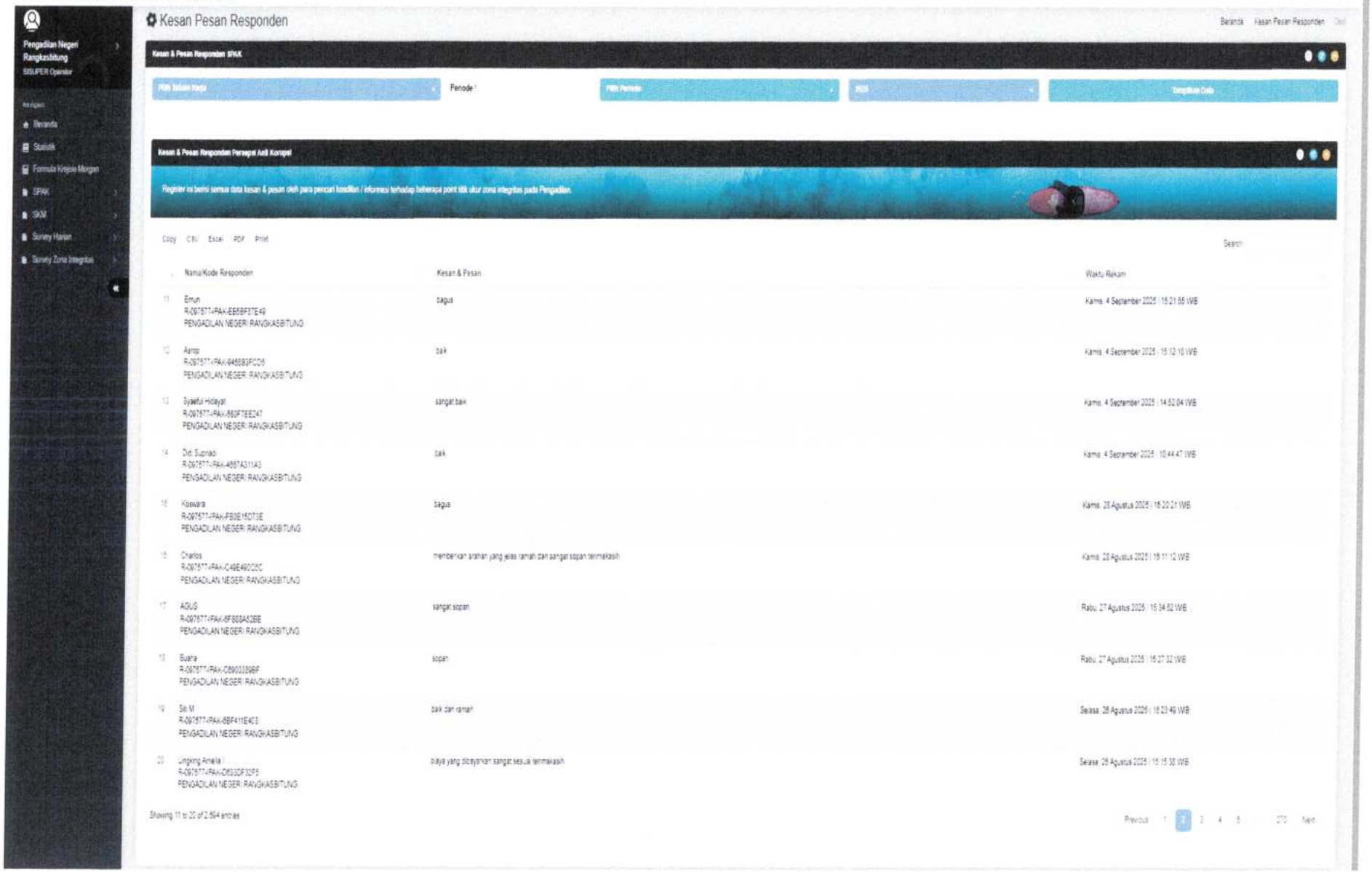

LAYANAN ELEKTRONIK
AN PERADILAN UMUM
Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi
Beranda Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi
Perhitungan Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi
Register ini berisi perhitungan survey indeks persepsi anti korupsi oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik ukur zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Keterangan
RL = Ruang Lingkup Pelayanan
NRR = Nilai rata-rata
IPAK = Indeks Persepsi Anti Korupsi
NRR per RL = Jml nilai per ruang lingkup / jml Kuesioner
NRR tertimbang = NRR per ruang lingkup x (1/10)
Bobot IPAK
1 Sangat Baik 81.26 - 100.00 3.26 - 4.00
2 Baik 62.51 - 81.25 2.51 - 3.25
3 Kurang Baik 43.76 - 62.50 1.76 - 2.50
4 Tidak Baik 25.00 - 43.75 1.00 - 1.75
Periode Triwulan I
NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN
Preview Publikasi
Indeks Total
Data Umum Responden
Data Domisili Responden
Data Umur Responden
Data Layanan
Nilai Per Unsur
Layanan
Jumlah (Orang)
1 Layanan Pidana 1
2 Layanan Perdata 15
3 Layanan Hukum / Informasi 44
4 Layanan e-Court 3

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM




APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Kesan Pesan Responden
Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Beranda
Statistik
Formula Krejcie Morgan
SPAK
SKM
Survey Harian
Survey Zona Integritas
Periode
Kesan & Pesan Responden Persepsi Anti Korupsi
Copy
CSV
Excel
PDF
Print
Search
Nama/Kode Responden
Kesan & Pesan
Waktu Rekam
Bpn Lebak
tak
Kamis, 25 September 2025 | 15:45:55 WIB
Kharisma Yudha
terimakasih
Kamis, 25 September 2025 | 11:29:57 WIB
Gunawan
tak dan sopan
Selasa, 23 September 2025 | 15:26:03 WIB
Yeni
tak
Selasa, 23 September 2025 | 15:15:08 WIB
Limbong
tak
Rabu, 10 September 2025 | 15:00:49 WIB
Abdurohman
tak
Rabu, 10 September 2025 | 15:42:13 WIB
Ade
memberikan arahan yang tak terimakasih
Senin, 8 September 2025 | 11:37:26 WIB
CHAERUL
sangat tak
Senin, 8 September 2025 | 11:31:03 WIB
Desky
tak
Kamis, 4 September 2025 | 15:28:14 WIB
Eneng Herawati
tak
Kamis, 4 September 2025 | 15:29:40 WIB
Showing 1 to 10 of 2,594 entries
Previous
Next

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Unit Pelayanan	:	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Alamat	:	JL. RA. KARTINI NO. 55 RANGKASBITUNG, LEBAK, BANTEN

Nomor Urut Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
53	4	4	1	4	4	1	4	1	1	1	
54	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
Total	252	252	246	252	252	80	252	248	249	249	0	0	0		
Nilai Rata-rata	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00		
															1
NRR Tertimbang	0,400	0,400	0,390	0,400	0,400	0,390	0,400	0,394	0,395	0,395	0,00	0,00	0,00	3,965	10
														25	
															0
														99,13	

Jumlah Responden

Bobot Linear

Nilai Penimbang

Bobot NRR Tertimbang

Nilai IPAK

Sangat Baik

Keterangan :

U1 - U10	: Unsur-unsur pelayanan
NRR	: Nilai Rata-rata
IKM	: Indeks Persepsi Korupsi
*)	: Jumlah NRR IPK Tertimbang
**)	: Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang per Unsur	: NRR per unsur x 0.071

IPK UNIT PELAYANAN : 100,00

Mutu Pelayanan		Kategorisasi Pelayanan
1 (Tidak bersih dari korupsi)	: 25 - 43,75	= 1,00 - 1,75 = 1
2 (Kurang bersih dari korupsi)	: 43,76 - 62,50	= 1,76 - 2,50 = 2
3 (Cukup bersih dari korupsi)	: 62,51 - 81,25	= 2,51 - 3,25 = 3
4 (Bersih dari korupsi)	: 81,26 - 100	= 3,26 - 4,00 = 4

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Manipulasi Peraturan	4,000
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000
U3	Menjual Pengaruh	3,905
U4	Transparansi Biaya	4,000
U5	Biaya Tambahan	3,905
U6	Hadiah	4,000
U7	Transparasi Pembayaran	3,952
U8	Percaloan	3,937
U9	Transparansi pembayaran	3,952
U10	Perbuatan curang	3,952